

KEBIJAKAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB PADA ANAK  
USIA DINI DI RAUDHATUL ATHFAL**R. Umi Baroroh & Novera Pratiwi**

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab

barorohty@yahoo.co.id

DOI: 10.14421/almahara.2015.011-08

Naskah diterima: 10-09-2015

direvisi: 15-10-2015

disetujui: 15-11-2015

## الملخص

إن اللغة العربية إحدى المواد التي يدرسها الأطفال في رياض الأطفال في أندونيسيا. و هكذا يظهر أن أندونيسيين يهتموم بهذه اللغة مع أن الحكومة أندونيسيا لم تكن عندها الحكم عنها. و هذا البحث ركز إلي حكم تعليم اللغة العربية في روضتي الأطفال خدمة امهات اتحاد (DWP) جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية و رياض الصالحين توموت سنيرساري مابودان سليمان بيوجياكرتا أندونيسيا. و هذا بحث ميداني كيفي و هو من بحوث الحكم. جمع البيانات بالملاحظة و المقابلة و الإستبانة دلت نتيجة البحث علي أن الحكومة أندونيسيا وزارة شؤون التربية و الثقافة و وزارة شؤون الدين لم تكن عندها حكمة أو حكم أو قانون عن تعليم اللغة العربية في روضة الأطفال. علي نقيض ذلك دلت دراسة حالة على أن روضتي الأطفال خدمة امهات اتحاد (DWP) جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية و رياض الصالحين توممت سنيرساري مابودان سليمان بيوجياكرتا أندونيسيا تقومون بتعليم اللغة العربية. تعليمها غير سواء : في روضة الأطفال خدمة أمهات اتحاد (DWP) جامعة سونان

كاليجاكا الإسلامية الحكومية مرة في الأسبوع وإعادة المادة كل يوم. وهذه المواد هي المفردات. أما في روضة الأطفال رياض الصالحين تومت سنيرساري مايودان سليمان بيوجياكرتا أندونيسيا فيجري بأغنية وألعاب.

الكلمات الرئيسية : حكم تعليم اللغة العربية, تعليم اللغة العربية, روضة الأطفال

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pendidikan Bahasa Arab, Raudlatul Athfal

### A. Pendahuluan

Dunia telah memasuki era globalisasi. Oleh karena itu kecakapan komunikasi antar budaya menjadi satu hal yang penting.<sup>1</sup> Dan kemampuan seseorang untuk dapat menggunakan bahasa asing merupakan satu hal yang tidak dapat dihindari.

Salah satu jenis bahasa asing yang penting untuk dipelajari oleh bangsa Indonesia adalah bahasa Arab.<sup>2</sup> Selain karena ia merupakan bahasa internasional, ia juga merupakan bahasa agama dimana Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang menjadi sumber ajaran agama Islam menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya. Sedangkan mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam

Mengingat urgensi bahasa Arab di atas, maka pengenalan dan pengajaran terhadapnya perlu diwujudkan pada peserta didik sejak usia dini. Salah satu jenjang sekolah bagi anak usia dini di Indonesia disebut dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). PAUD adalah investasi bangsa yang sangat berharga. Keberadaannya perlu mendapatkan

---

<sup>1</sup> Globalisasi ditandai dengan meningkatnya intensitas interaksi dan komunikasi lintas batas dan budaya. Media massa (televisi, surat kabar, dan internet) merupakan faktor utama terjadinya globalisasi.

<sup>2</sup> Bagi setiap muslim mempelajari bahasa Arab merupakan suatu kewajiban walaupun hanya sekedar melafalkannya saja tanpa harus memahami maksudnya. Sebagai contoh; Ibadah sholat 5 waktu yang wajib menggunakan bahasa Arab.

perhatian yang lebih besar dan serius, khususnya dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

Lembaga PAUD yang ada di bawah naungan Kementerian Agama adalah Raudhatul Athfal. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada Bab I, Pasal 1 Ayat 5 menerangkan bahwa Raudhatul Athfal (selanjutnya disebut RA) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.<sup>3</sup>

Berdasarkan hierarki konstitusional, penyelenggaraan pendidikan RA berada di bawah naungan Kementerian Agama (selanjutnya disebut Kemenag). Dengan demikian, realisasi dan pelaksanaan pendidikan di RA bergantung pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kemenag. Kebijakan-kebijakan pendidikan yang disusun oleh Kemenag tentunya akan menjadi pedoman dasar bagi pihak penyelenggara di RA untuk pengembangan pendidikan yang dilaksanakannya. Mengingat urgensi Bahasa Arab sebagai bahasa agama Islam dan bahasa internasional, sebagaimana telah dijelaskan pada awal paragraf sebelumnya, maka kebijakan dan pengajaran Bahasa Arab di RA merupakan sebuah kenyataan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Beberapa fakta lapangan menyatakan bahwa pendidikan atau pengajaran bahasa Arab di RA hanya sebatas pelajaran tambahan atau sisipan dalam materi Pendidikan Agama Islam (PAI), meskipun dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya telah menggunakan metode pembelajaran bahasa Arab yang efektif.

Pertanyaan utama yang muncul kemudian adalah bagaimana kebijakan pengajaran bahasa Arab di RA dan bagaimana implementasinya di lembaga-lembaga pendidikan Raudlatul Athfal ?

## 1. Kebijakan Pendidikan

---

<sup>3</sup><http://www.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2012/10/Permen172010PencegahandanPenanggulanganPlagiatdiPT.pdf>, akses 15 Januari 2013.

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Kebijakan pendidikan terletak dalam tatanan normatif dan tatanan deskriptif.<sup>4</sup>

Kebijakan pendidikan berproses melalui tahapan-tahapan perumusan kebijakan pendidikan, legitimasi kebijakan pendidikan, komunikasi dan sosialisasi kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, menggunakan partisipasi publik dalam kebijakan pendidikan, dan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan.<sup>5</sup>

Adapun aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan lima di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan deliberasi mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi-manusia dalam lingkungan kemanusiaan.
2. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, realisasi atau pelaksanaan, dan evaluasi.
3. Pendidikan merupakan milik masyarakat. Apabila pendidikan itu merupakan milik masyarakat maka perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan perlu mendengar suara atau saran-saran dari masyarakat.
4. Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Suatu kebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak tetapi dapat diimplementasikan. Suatu kebijakan pendidikan merupakan pilihan dari berbagai alternatif kebijakan sehingga perlu dilihat output dari kebijakan tersebut dalam praktik pelaksanaannya.

---

<sup>4</sup> H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 140.

<sup>5</sup> Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 31.

5. Kebijakan pendidikan ditujukan kepada kebutuhan peserta didik. Bukan untuk kepentingan kekuasaan, partai politik, birokrat, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Penjabaran visi dan misi pendidikan tidak dapat berdiri sendiri dan terlepas dari hakikat manusia yang memiliki aspek-aspek personal dan sosial sekaligus. Oleh sebab itu, perumusan visi dan misi pendidikan juga tergantung pada aspek-aspek politik-sosial-ekonomi di mana manusia itu hidup. Selanjutnya, karena pendidikan itu merupakan suatu ilmu pengetahuan praksis yaitu kesatuan antara teori dan praktik maka analisis kebijakan pendidikan merupakan salah satu input yang penting pula dalam perumusan visi dan misi pendidikan.

## 2. Pendidikan Anak Usia Dini

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.<sup>7</sup> Uraian lebih lanjut tentang PAUD dijelaskan dalam bagian ketujuh pasal 28 undang-undang tersebut. Penjelasan lebih rinci dan komprehensif tentang PAUD termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Di dalam Peraturan ini bab I pasal 1 disebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan anak sejak lahir sampai usia 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.<sup>8</sup> Lingkup perkembangan yang dirangsang meliputi nilai agama dan moral,

---

<sup>6</sup> Tilaar dan Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, hlm. 141-154.

<sup>7</sup> <http://www.bapsi.undip.ac.id/images/Download/Dokumen/uu%20no.20%20thn%202003%20sisdiknas.pdf>, akses 15 Januari 2013.

<sup>8</sup> Lihat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Bab I Pasal 1.

fisik-motorik yang meliputi motorik kasar dan halus serta kesehatan dan perilaku keselamatan, kognitif, bahasa dan seni.<sup>9</sup>

Pendidikan anak Usia Dini ini dalam implementasinya harus memperhatikan dan menjadikan perkembangan anak sebagai landasan kurikulum dan program pembelajarannya.<sup>10</sup> Dan Anak Usia Dini memiliki beberapa ciri-ciri umum antara lain:<sup>11</sup>

#### 1. Ciri Fisik.

Adapun ciri fisik Anak Usia Dini yaitu:

- a. Anak pra sekolah umumnya sangat aktif. Anak pada usia ini sangat menyukai kegiatan yang dilakukan atas kemauan sendiri. Kegiatan mereka yang dapat diamati seperti: suka berlari, memanjat, dll.
- b. Anak membutuhkan istirahat yang cukup. Dengan adanya sifat aktif, maka biasanya setelah melakukan banyak aktifitas anak memerlukan istirahat walaupun kadangkala kebutuhan anak beristirahat tidak disadarinya.
- c. Otot-otot besar anak pra sekolah berkembang dari control jari dan tangan. Dengan demikian anak usia pra sekolah belum bisa melakukan aktifitas yang rumit seperti mengikat tali.
- d. Sulit memfokuskan pandangan pada objek-objek yang ukurannya kecil sehingga koordinasi tangan dan matanya masih kurang sempurna.
- e. Dibandingkan dengan anak laki-laki, anak perempuan lebih terampil dalam tugas yang bersifat praktis, khususnya dalam tugas motorik halus.

#### 2. Ciri Kognitif, yaitu:

---

<sup>9</sup> Lihat Himpaudi, Suplemen Materi Seminar Nasional Kurikulum PAUD, SPORTARIUM UMY-Jogyakarta, 28 Mei 2015, hlm. 13-15

<sup>10</sup> Carol Seefeldt & Barbara A. Wasik, *Pendidikan Anak Usia Dini Menyiapkan Anak Usia Tiga, Empat, dan Lima Tahun Masuk Sekolah*, Terj. Pius Nasar (Jakarta: Indeks, 2008), hlm. 17-21

<sup>11</sup> Rusdinal dan Elizar, *Pengelolaan Kelas Di Taman Kanak-Kanak* (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional 2005), hlm. 22.

- a. Anak pra sekolah umumnya telah terampil dalam berbahasa. Pada umumnya mereka senang berbicara, khususnya dalam kelompoknya.
- b. Kompetensi anak perlu dikembangkan melalui interaksi, minat, kesempatan, mangagumi, dan kasih sayang.
3. Ciri Emosional, yaitu:
  - a. Anak usia prasekolah cenderung mengekspresikan emosinya secara bebas dan terbuka. Ciri ini dapat dilihat dari sikap marah yang sering ditunjukkannya.
  - b. Sikap iri pada usia prasekolah sering terjadi, sehingga mereka berupaya untuk mendapatkan perhatian orang lain secara berebut.
4. Ciri Sosial, yaitu:
  - a. Anak usia dini memiliki satu atau dua sahabat tetapi sahabat ini cepat berganti. Penyesuaian diri mereka berlangsung secara cepat sehingga mudah bergaul. Umumnya mereka cenderung memilih teman yang sama jenis kelaminnya, kemudian berkembang ke jenis kelamin yang berbeda.
  - b. Anggota kelompok bermain jumlahnya kecil dan tidak terorganisir dengan baik. Oleh karena itu kelompok tersebut tidak bertahan lama dan cepat berganti.
  - c. Anak yang lebih kecil usianya seringkali bermain bersebelahan dengan anak yang lebih besar usianya.
  - d. Perselisihan sering terjadi, tetapi hanya berlangsung sebentar, kemudian hubungannya menjadi baik kembali
  - e. Anak usia prasekolah telah mulai mempunyai kesadaran terhadap perbedaan jenis kelamin dan peran sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. Dampak kesadaran ini dapat dilihat dari pilihan terhadap alat-alat permainan.

### **3. Pemerolehan Bahasa Pada Anak Usia Dini Dalam Tinjauan Teori Jendela Peluang (*Windows of Opportunity*)**

Pemerolehan bahasa anak dapat diartikan sebagai suatu proses di mana anak mulai mengenal interaksi dan komunikasi dengan lingkungannya. Anak belajar bahasa baik non verbal ataupun verbal telah dimulai sejak lahir dan proses pemerolehan itu terus berjalan seiring dengan bertambahnya usia anak, sampai dia mencapai tingkat

penguasaan yang sempurna. Bahasa anak akan berkembang seiring dengan interaksi komunikasi yang dilakukan dengan orang lain.<sup>12</sup>

Ada tiga faktor paling signifikan yang mempengaruhi anak dalam berbahasa yaitu biologis, kognitif, dan lingkungan. Evolusi biologi menjadi salah satu landasan perkembangan bahasa yang membentuk manusia menjadi makhluk linguistik. Noam Chomsky meyakini bahwa manusia terikat secara biologis untuk mempelajari bahasa pada suatu waktu tertentu dan dengan cara tertentu juga. Ia menegaskan bahwa setiap anak mempunyai *Language Acquisition Device* (LAD), yaitu kemampuan alamiah anak untuk berbahasa. Tahun-tahun awal masa kanak-kanak merupakan periode yang penting untuk belajar bahasa. Jika pengenalan bahasa tidak terjadi sebelum masa remaja, maka ketidakmampuan dalam menggunakan tata bahasa yang baik akan dialami seumur hidup.<sup>13</sup>

Faktor kognitif individu merupakan satu hal lain yang tidak bisa dipisahkan pada perkembangan bahasa anak, para ahli kognitif menegaskan bahwa kemampuan anak berbahasa tergantung pada kematangan kognitifnya. Tahap awal perkembangan intelektual anak terjadi dari lahir 2 tahun. Pada masa itu anak mengenal dunianya melalui sensasi yang didapat dari inderanya dan selanjutnya membentuk persepsi mereka akan segala hal yang berada di luar dirinya.

Sementara itu, di sisi lain proses pemerolehan atau penguasaan bahasa anak tergantung juga dari stimulus dari lingkungan luar. Pada umumnya, anak diperkenalkan bahasa sejak awal perkembangan mereka oleh proses replikasi, imitasi dan perulangan bahasa dari orang-orang di sekitarnya.<sup>14</sup>

Colan, seorang ahli psikolinguistik, menyatakan bahwa jika tidak ada gangguan dalam lingkungan prenatal, bayi lahir memiliki bekal 100 miliar neuron dengan koneksi-koneksi awal pembentuknya. Otak masih merupakan produk mentah yang belum selesai. Tugas lingkunganlah

---

<sup>12</sup> Mamluatul Hasanah, *Proses Manusia Berbahasa Perspektif Al-Qur'an dan Psikolinguistik*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 59.

<sup>13</sup> Hasanah, *Proses Manusia Berbahasa*, hlm. 43.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 44



yang akan menyelesaikan, menyempurnakan, atau membengkalaikannya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengembangan otak mempunyai batas waktu pengembangan yang disebut sebagai *windows opportunity* (jendela peluang). Proses penyempurnaan koneksi-koneksi dendrit terhenti begitu jendela peluang ini tertutup.<sup>15</sup>

Jendela peluang ini mencakup beberapa proses, seperti perkembangan motorik, pengendalian emosi, kemampuan linguistik, matematika, logika, musik dan sebagainya. Jendela peluang inilah yang kemudian dalam psikolinguistik disebut sebagai periode kritis. Bila dikaitkan dengan kompetensi linguistik, jendela peluang untuk belajar bahasa mulai terbuka pada usia dua bulan. Daerah otak yang berkaitan dengan bahasa menjadi sangat aktif pada usia 18 sampai 20 bulan. Bayi menguasai sekitar 900 kata pada usia tiga tahun. Jendela peluang berbahasa ini sebenarnya tetap terbuka sepanjang hidup manusia tetapi beberapa komponen berbahasa tertutup lebih awal. Misalnya, jendela bahasa tutur (*spoken language*) akan tertutup pada usia sepuluh atau sebelas tahun.<sup>16</sup>

Kebanyakan orang belajar lebih dari satu bahasa dalam dunia ini. Seorang anak mungkin dapat mengetahui atau belajar dua bahasa atau lebih dari permulaan hidupnya, umpamanya kalau orangtuanya menggunakan dua bahasa yang berbeda-beda di rumah dan di luar rumah. Dalam hal ini, sebagaimana dinyatakan oleh Klein, masih dapat dikatakan sebagai pemerolehan B1, meskipun bukan satu tetapi dua bahasa yang merupakan B1-nya. Akan tetapi, bila tidak diperoleh bersamaan, "bahasa asing" yang dipelajari setelah memperoleh B1 disebut dengan bahasa kedua (B2). Hal ini lebih biasa terjadi di mana seorang anak belajar B2 setelah B1-nya matang atau mantap. Pemerolehan B1 terjadi apabila anak yang belum pernah belajar bahasa apapun mulai belajar bahasa untuk yang pertama kalinya. Jika memperoleh satu bahasa disebut ekabahasaan (*monolingual*), jika memperoleh dua bahasa sekaligus

---

<sup>15</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Belajar Cerdas: Belajar Berbasis Otak*, (Bandung: Mizan Center, 2007), hlm. 223

<sup>16</sup> Hasanah, *Proses Manusia Berbahasa*, hlm. 43.

disebut dwibahasa (*bilingual*), dan jika lebih dari dua bahasa secara berurutan disebut gandabahasa (*multilingual*).<sup>17</sup>

Anak ekabahasaan memperoleh bahasanya dari orangtua, sedangkan pada anak dwibahasawan bahasanya dipengaruhi oleh orang tua, keluarga besar, kakek-nenek, taman bermain, teman di lingkungan penitipan anak, dan tetangga. Pejalan (*exposure*) bahasa pertama dan kedua pada anak dwibahasa bisa berfluktuasi seiring keluasan area sosialisasinya. Pemerolehan B2 dapat terjadi dengan bermacam-macam cara, pada usia berapa saja, untuk tujuan bermacam-macam, dan pada tingkat kebahasaan yang berlainan. Berdasarkan fakta ini, pemerolehan B2 dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pemerolehan secara alamiah dan pemerolehan secara terpimpin. Pemerolehan secara alamiah atau spontan adalah pemerolehan B2 yang terjadi dalam komunikasi sehari-hari; bebas dari pengajaran atau pimpinan guru/pendidik. Sebaliknya, pemerolehan secara terpimpin adalah pemerolehan B2 yang dilakukan dengan mengajarkan kepada pembelajar dengan cara menyajikan materi yang sudah direncanakan tanpa latihan yang terlalu ketat dan kesalahan pihak pembelajar.<sup>18</sup>

Kerap timbul keraguan tentang pemerolehan dwibahasa pada anak sehingga sebagian orang mengkhawatirkan adanya sisi negatif kedwibahasa yang diperoleh pada anak usia dini atau usia prasekolah. Keraguan ini muncul di kalangan orang tua dan praktisi pendidikan yang tinggal di lingkungan ekabahasaan. Kelompok ini pada akhirnya memandang bahwa lebih lumrah menjadi ekabahasaan daripada dwibahasawan. Fred Genesee, seorang profesor *bilingualisme*, menggarisbawahi beberapa tanggapan “miring” yang dikeluhkan terkait dengan pemerolehan bahasa asing (dwi bahasa). Berikut uraian beberapa keluhan beserta tanggapan atasnya:<sup>19</sup>

1. **Keluhan:** Mempelajari dua bahasa itu sulit dan berakibat pada keterlambatan bahasa. **Tanggapan:** Sesungguhnya anak dengan

---

<sup>17</sup> Nur Indah dan Abdurrahman, *Psikolinguistik: Konsep & Isu Umum*, hlm. 71-72.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 77-78.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 73-76.

pejanan pada dua bahasa yang berbeda tetap dapat mencapai perkembangan kompetensi bahasa dengan cepat sesuai dengan intensitas pejanan. Satu yang perlu diingat bahwa terdapat perbedaan antar individu yang cukup beragam dalam hal pemerolehan kata-kata pertama dan mengucapkan kalimat kompleks lebih cepat dari temannya. Keterlambatan yang terjadi bukanlah permasalahan serius karena hal itu menandakan bahwa anak perlu lebih butuh banyak waktu untuk menguasai bahasa tersebut. Di sini yang terpenting orang tua mampu menciptakan pejanan yang sistematis antara kedua bahasa agar terjadi keseimbangan.

2. **Keluhan:** Anak dwibahasawan kurang memperoleh pejanan pada salah satu bahasa. Akibatnya mereka tidak pernah menguasai seutuhnya kedua bahasa tersebut. **Tanggapan:** pandangan ini kurang tepat karena anak dwibahasawan dapat mencapai keterampilan yang sama pada kedua bahasa sebagaimana anak ekabahasawan meskipun pejanannya berbeda.
3. **Keluhan:** Anak dwibahasa tidak dapat memisahkan kedua bahasanya. Mereka menggunakan keduanya sekaligus dan kadang kebingungan. **Tanggapan:** Riset membuktikan bahwa penggunaan kedua bahasa secara serentak bukan disebabkan kebingungan anak melainkan karena keterbatasan kosakata pada salah satu bahasa sehingga dipilih kata dari bahasa lain. Sebenarnya hal ini merupakan strategi komunikasi yang efektif karena baik orang tua maupun orang lain telah memahami kedua bahasa tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerolehan dwibahasa pada anak usia dini atau pra sekolah terkait dengan hal berikut:<sup>20</sup>

- a. Pemerolehan dwibahasa bersifat umum dan dialami dalam proses tumbuh kembang anak normal.
- b. Semua anak mampu mempelajari dua bahasa atau lebih.
- c. Dengan mengetahui bahasa orangtuanya, dapat dikenali komponen identitas budaya anak dan rasa memiliki anak pada bahasanya.

---

<sup>20</sup> Nur Indah dan Abdurrahman, *Psikolinguistik: Konsep & Isu Umum*, hlm. 71-72.

- d. Pemerolehan dwibahasa didukung pejanan atau pengalaman berbahasa yang melimpah, beragam, dan terus menerus.
- e. Kefasihan dalam kedua bahasa dapat terjadi apabila ada kesinambungan pejanan antara bahasa B1 yang digunakan di rumah dengan bahasa B2 yang digunakan di masyarakat luas.
- f. Orang tua dapat memfasilitasi kefasihan dalam dwibahasa dengan menggunakan bahasa yang mereka kuasai betul dengan beragam cara.

#### **4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Bahasa Anak**

Dalam pemerolehan bahasa asing ada beberapa faktor yang mendukung kemampuan bahasa asing anak yaitu:

##### **a. Faktor motivasi**

Ada beberapa asumsi yang menyatakan bahwa keberhasilan dari pembelajaran bahasa kedua adalah keinginan, dorongan, dan tujuan yang akan dicapai dalam belajar bahasa kedua akan berpengaruh terhadap perkembangan psikologi anak.

##### **b. Faktor usia**

Dalam pembelajaran bahasa kedua anak-anak lebih baik dan berhasil dalam pembelajaran bahasa kedua dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak-anak lebih mudah dalam memperoleh bahasa baru, sedangkan orang dewasa tampaknya mendapat kesulitan dalam memperoleh tingkat kemahiran bahasa kedua.

##### **c. Faktor penyajian formal**

Pembelajaran bahasa kedua secara formal memiliki pengaruh terhadap kecepatan dan keberhasilan dalam memperoleh bahasa kedua karena faktor dan variabel telah disiapkan dan diadakan dengan sengaja.

##### **d. Faktor bahasa pertama**

Menurut teori stimulus-respons, bahasa adalah hasil perilaku stimulus-respons, maka apabila seorang pembelajar ingin memperbanyak penggunaan ujaran, ia harus memperbanyak penerimaan stimulus. Sedangkan teori kontrastif menyatakan bahwa keberhasilan belajar bahasa kedua sedikit banyaknya ditentukan oleh keadaan linguistik bahasa yang telah dikuasainya.

##### **e. Faktor lingkungan**

Daulay menerangkan bahwa kualitas lingkungan bahasa sangat penting bagi seorang pembelajar untuk dapat berkembang dalam mempelajari bahasa kedua. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan bahasa adalah segala sesuatu yang didengar dan dilihat oleh pembelajar sehubungan dengan bahasa kedua yang sedang dipelajari.

## B. Hasil dan Pembahasan

### Pendidikan Anak Usia Dini Raudhatul Athfal

Salah satu jenis pendidikan formal untuk anak usia dini yang berada di bawah naungan pemerintah adalah Raudhatul Athfal (RA). PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada Bab I, Pasal 1 Ayat 5 menerangkan bahwa Raudhatul Athfal merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.<sup>21</sup>

Fungsi pendidikan RA adalah membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Tujuan pendidikan RA, sebagaimana dalam kurikulum Kemenag, adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab;

---

<sup>21</sup><http://www.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2012/10/Permen172010PencegahandanPenanggulanganPlagiatdiPT.pdf>, akses 15 Januari 2013.

<sup>22</sup>Hasil wawancara dan dokumentasi bersama Bapak Imam Khoiri, S.Ag., di Kanwil Kemenag DIY pada 30 April 2013. Baca dalam buku: Tim Penyusun, *Panduan Implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal*, (Yogyakarta: Kanwil Kemenag DIY, 2011), hlm. 3.

2. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa usia emas (*golden age*) pertumbuhan dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan; 3) Membantu peserta didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi Akhlakul karimah, sosial-emosional dan kemandirian, Pendidikan Agama Islam (PAI), bahasa, kognitif, dan fisik/motorik, untuk siap memasuki pendidikan selanjutnya.

### C. Analisis Kebijakan Pendidikan Bahasa Arab oleh Kemenag

Kementerian Agama Republik Indonesiadi tahun 2010-2014 menetapkan lima kebijakan utama yang tercantum dalam misinya berikut ini:<sup>23</sup>

- 1) Peningkatan kualitas kehidupan beragama;
- 2) Peningkatankualitas kerukunan umat beragama;
- 3) Peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- 4) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan;
- 5) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Untuk menjalankan 5 kebijakan tersebut, dibuat dan ditetapkanlah berbagai macam program kerja Kementerian Agama. Salah satu program yang diunggulkan adalah program Pendidikan Islam. Program pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan pendidikan Islam.

Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan Islam, Kemenag menyusun beberapa langkah strategis meliputi:<sup>24</sup>

- 1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;

---

<sup>23</sup><http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/BAB2.pdf>. Diakses pad 15 Februari 2013.

<sup>24</sup><http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/BAB2.pdf>. Diakses pad 15 Februari 2013.

- 2) Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah; Madrasah Tsanawiyah; Madrasah Aliyah;
- 3) Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu;
- 4) Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
- 5) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam;
- 6) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Keagamaan Islam;
- 7) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
- 8) Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Pengawas Pendidikan Agama Islam; dan lain-lain.

Secara garis besar output yang hendak dicapai dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan Islam antara lain: tersedia dan terjangkau layanan pendidikan, meningkatnya mutu layanan pendidikan, meningkatnya mutu dan daya saing lulusan, dan meningkatnya mutu tata kelola. Kebijakan-kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara atau stockholder pendidikan yang berada di bawah naungan Kemenag RI khususnya bagi Kantor Wilayah Kemenag di setiap provinsi yang ada di Indonesia, tidak terkecuali Kanwil Kemenag Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di dalam uraian kebijakan tersebut dan juga dalam berbagai peraturan Kemenag yang lain tidak disebutkan secara spesifik mengenai kebijakan pendidikan Bahasa Arab khususnya bagi lembaga pendidikan Raudhatul Athfal. Kebijakan pendidikan bahasa Arab di Kemenag belum ada karena pendidikan bahasa Arab dianggap belum perlu diajarkan bagi pendidikan anak usia dini. Hal tersebut disebabkan karena pendidikan anak usia dini lebih banyak memberikan kebebasan bagi anak dalam hal bermain. Materi pendidikan bahasa Arab sendiri sebenarnya telah dicantumkan dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) namun dengan porsi yang relatif terbatas seperti; pengenalan nama-nama benda di lingkungan sekitar, nama-nama pekerjaan, dan sejenisnya.

Kanwil Kemenag DI Yogyakarta khususnya bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Mapenda) belum pernah membuat sebuah kebijakan yang mengatur secara khusus pengajaran bahasa Arab bagi pendidikan anak usia dini. Meskipun demikian, Kemenag

memperbolehkan pihak RA menyusun kebijakan otonom untuk lembaganya sendiri dalam rangka pendidikan atau pembelajaran bahasa Arab tetapi dengan syarat RA tersebut memberikan laporan atas rencana dan realisasi program tersebut. Oleh sebab itu, perumusan kebijakan pendidikan bahasa Arab bagi RA dianggap belum perlu.<sup>25</sup>

Di sisi yang lain, perhatian masyarakat terhadap pembelajaran bahasa Arab untuk anak-anak semakin besar. Gairah keagamaan dan kebutuhan akan pemahaman bahasa Arab untuk mendukung keberagaman mereka juga meningkat. Meskipun demikian masih banyak problem yang harus ditangani dalam pengajaran bahasa Arab untuk anak-anak sebagaimana halnya problematika yang ada dalam pengajaran bahasa Arab untuk usia remaja dan dewasa. Beberapa problematika tersebut antara lain terkait dengan pengajar, buku pegangan, dan juga metode pengajaran.<sup>26</sup> Problematika utama lainnya adalah kebijakan (di tingkat pemerintahan) yang mengatur pendidikan bahasa Arab bagi anak usia dini juga belum terumuskan secara jelas.

Meskipun pembelajaran bahasa asing (bahasa Arab) untuk anak-anak sudah berlangsung sejak lama namun hingga saat ini di kalangan pemerintah maupun kaum intelektual pada umumnya belumlah ada kesepakatan tunggal tentang batas awal pengenalan bahasa asing bagi anak usia dini. Salah satu pihak beranggapan bahwa pembelajaran bahasa Arab yang efektif dan efisien haruslah dimulai sejak dini mungkin namun pihak yang lainnya berpendapat bahwa pembelajaran bahasa Arab sejak usia dini yaitu untuk mereka yang berumur di bawah usia 6 tahun belumlah efektif sebab akan mengganggu perkembangan bahasa sang anak didik.

Adapun alasan-alasan utama dari para pendukung pengajaran bahasa asing untuk anak-anak antara lain: (a) Semakin hari kebutuhan akan penguasaan bahasa asing semakin meningkat maka harus dipersiapkan sejak dini, (b) Sudah banyak masyarakat yang

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan bapak Drs.. Noor Hamid, M.Pd., Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag DIY pada 4 Maret 2013 di Kanwil Kemenag DIY.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 374.



menggunakan dua atau lebih bahasa untuk komunikasi sehari-hari mereka, (c) Dari sudut pandang pendidikan, mengajarkan bahasa asing kepada anak-anak sejak dini berarti membekali mereka dengan wawasan hidup yang mengglobal, (d) Anak-anak mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk belajar banyak bahasa, (e) Pada masa kanak-kanak kondisi otak lebih fleksibel sehingga mudah untuk diperkenalkan dengan beberapa bahasa, (g) Penguasaan bahasa berasal dari kebiasaan maka membiasakan anak-anak untuk berbahasa dengan beberapa bahasa sekaligus sejak dini lebih mudah dari pada ketika mereka sudah dewasa, (h) pengalaman beberapa negara dalam mengajarkan bahasa asing untuk anak-anak menunjukkan hasil yang menggembirakan.<sup>27</sup>

Pihak kedua yang kontra memandang bahwa bahasa Arab adalah bahasa asing yang bersifat tambahan yang dipelajari oleh seseorang di luar bahasa induk yang menjadi bahasa komunikasinya sehari-hari. Beberapa alasan yang diajukan atas penolakan pembelajaran bahasa asing untuk anak-anak pra sekolah antara lain: (a) pelajaran bahasa asing menyulitkan anak-anak, (b) bahasa asing lebih efektif diajarkan pada usia remaja dan dewasa (c) mempelajari bahasa asing dapat menghalangi anak-anak menguasai bahasa ibunya dengan baik, (d) dualisme bahasa dapat menghalangi pertumbuhan kognisi dan efeksi anak-anak.<sup>28</sup>

Kementrian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama lebih condong pada paradigma yang kedua yaitu tidak memaksakan pendidikan bahasa Arab untuk anak-anak usia pra sekolah yaitu mereka yang belajar di tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak (Raudhlatul Athfal). Hal ini bersesuaian dengan rumusan yang tercantum dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 66 Ayat 1 & 2 yang menyatakan bahwa program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan bentuk lain yang sederajat dengan program pembelajaran yang dilaksanakan dalam konteks bermain.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Fakhrurrozi dan Mahyudin, *Pembelajaran Bahasa Arab*, hlm. 379.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 375.

<sup>29</sup><http://www.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2012/10/Permen172010PencegahandanPenanggulanganPlagiatdiPT.pdf>, akses 15 Januari 2013.

Konsep tentang bermain tersebut disampaikan oleh kepala bidang Mapenda Kemenag Yogyakarta dalam pernyataannya berikut ini:

“Memang belum pernah ada pembahasan secara khusus mengenai kebijakan pendidikan bahasa Arab antara Kemenag dengan pihak RA karena memang model pendidikan di tingkat taman kanak-kanak itu lebih banyak memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk bermain.”<sup>30</sup>

Konsep “bermain” dalam pendidikan anak usia dini ini dikelompokkan menjadi 5 kategori yaitu:<sup>31</sup>

1. Bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia
2. Bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian
3. Bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi
4. Bermain dalam rangka pembelajaran estetika, dan
5. Bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Dalam cakupan point ketiga disebutkan bahwa program pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi pada RA/TK, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik secara akademik memasuki SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat dengan menekankan pada penyiapan kemampuan berkomunikasi dan berlogika melalui berbicara, mendengarkan, pra-membaca, pra-menulis, dan pra-berhitung yang harus dilaksanakan secara hati-hati, tidak memaksa, dan menyenangkan sehingga anak menyukai belajar. Berdasarkan cakupan tersebut maka, pendidikan bahasa Arab termasuk ke dalam kemampuan berkomunikasi dan berlogika melalui berbicara.

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan bapak Drs.. Noor Hamid, M.Pd., Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag DIY pada 4 Maret 2013 di Kanwil Kemenag DIY.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan bapak Imam Khoiri, S.Ag., Kepala Kurikulum Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag DIY pada 30 April 2013 di Kanwil kemenag DIY.

Meskipun demikian dalam struktur dan isi kurikulum memang tidak ada kebijakan yang menyebutkan secara khusus dan mendalam tentang implementasi pendidikan bahasa Arab pada anak usia dini. Penjelasan tentang mengapa belum ada kebijakan pendidikan bahasa Arab bagi RA disampaikan oleh bapak Imam Khoiri, S.Ag sebagai berikut:

“Kendala penerapan kebijakan pendidikan bahasa Arab ini memang berada pada tataran teknis pelaksanaan. Kebijakan bahasa Arab itu akan dibuat apabila memenuhi target yang diharapkan mbak. Artinya ada kesepakatan dari keseluruhan RA untuk mengajarkan bahasa Arab. Salah satu permasalahan yang kita hadapi adalah banyaknya RA yang mana masing-masing memiliki kondisi dan potensi siswa dan target yang berbeda. Pada dasarnya pihak Kemenag hanya memberikan panduan kurikulum umumnya saja dan untuk pengembangannya diserahkan kepada RA masing-masing.”<sup>32</sup>

Dari uraian di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa dari pihak pemerintahan belum terdapat rumusan kebijakan yang mengatur secara khusus tentang pengajaran Bahasa Arab bagi pendidikan anak usia dini khususnya dari Kemenag kepada Raudhatul Athfal. Beberapa kebijakan dari pemerintah berupa undang-undang juga memperlihatkan bahwa pendidikan anak usia dini kurang mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Perhatian lebih dari pemerintah terhadap pendidikan terfokus dan dimulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI). Di jenjang pendidikan dasar (SD/MI) inilah kebijakan tentang pendidikan bahasa Arab mulai terlihat. Misalnya, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.

Kenyataan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, diberlakukannya kebijakan Otonomi Daerah. Dengan kehadiran UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana

---

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan bapak Imam Khoiri, S.Ag., Kepala Kurikulum Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag DIY pada 30 April 2013 di Kanwil kemenag DIY.

sejumlah kewenangan telah dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, memungkin daerah untuk melakukan kreasi, inovasi, dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam Pasal 10 ayat 3 disebutkan bahwa urusan pendidikan merupakan kewenangan daerah otonom (Pemda) karena, tidak termasuk dalam kewenangan Pemerintah Pusat yang meliputi: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama.<sup>33</sup>

Kedua, kurangnya pembinaan dan koordinasi antar pejabat pemerintah daerah. Selama pelaksanaan otonomi daerah, pembinaan dan koordinasi semakin sulit dilakukan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya "gengsi" antarpejabat, yang biasanya bupati/walikota "enggan" selalu berkonsultasi dengan gubernur karena merasa bukan bawahan dan tidak memiliki hubungan hierarkis. Maka ketika rapat-rapat dinas dan koordinasi dilakukan yang semestinya harus diikuti bupati/walikota seprovinsi hanya diikuti utusan-utusan dari kabupaten/kota.<sup>34</sup>

Ketiga, pendidikan Islam masih menjadi subsistem pendidikan nasional. Pendidikan umum yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional sudah jelas posisinya karena pendidikan termasuk yang kewenangannya diserahkan kepada daerah atau didesentralisasikan. Sementara itu, pendidikan agama yang berada di bawah naungan Kemenag belum jelas posisi dan kedudukannya. Ada keinginan bahwa lembaga-lembaga pendidikan agama ini juga didesentralisasikan dalam artian pengeolaannya di bawah satu atap yaitu Dinas Pendidikan daerah. Dengan berada dalam satu atap, diharapkan posisi pendidikan agama tidak lagi termarginalkan terutama dalam aspek pembiayaan sebab ia akan mendapatkan anggaran pembiayaan daerah (APBD) namun di satu sisi masih banyak yang berkeinginan agar posisi pendidikan agama tetap berada di bawah Kemenag dengan didekonsentrasikan ke Kantor

---

<sup>33</sup> Tilaar dan Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, hlm. 372. Lihat juga, Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Pendidikan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 17.

<sup>34</sup> Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, hlm. 32.

Wilayah Kemenag Provinsi setempat, dengan harapan akan mendapat pembiayaan dari APBD. Akan tetapi, dalam realitas penyelenggaraannya banyak yang memprihatinkan.<sup>35</sup>

Sampai saat ini belum terdapat kesamaan visi dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam di daerah. Pihak Pemerintah Daerah umumnya masih beranggapan bahwa pengelolaan lembaga pendidikan Islam bukanlah tanggung jawab mereka melainkan tanggung jawab Kemenag sehingga tidak perlu ada anggaran secara khusus. Sementara itu, Kemenag yang merupakan payung penyelenggara pendidikan Islam memiliki keterbatasan dalam pembiayaan. Kemampuan bergainung dengan Pemda juga sangat rendah, dan jarang sekali terjadi komunikasi yang baik antara Kemenag dengan Pemda menyangkut pembiayaan lembaga pendidikan yang menjadi binaannya. Paling jauh hanya sekedar minta bantuan, tetapi tidak terangkan secara khusus dari APBD. Meskipun pendidikan Islam tidak jarang mendapatkan tekanan dan kurang mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah namun pendidikan Islam telah berhasil survive di dalam berbagai situasi dan kondisi yang dihadapinya.<sup>36</sup>

### **Contoh Kasus Kebijakan Pendidikan Bahasa Arab di RA DWP UIN Sunan Kalijaga dan di RA IT Riyadus Salihin dan Realisasinya di Lapangan**

Visi RA DWP UIN Sunan Kalijaga mencakup enam hal yaitu terwujudnya insan yang kreatif; terwujudnya insan yang cerdas; terwujudnya insan yang ceria; terwujudnya insan yang mandiri; terwujudnya insan yang berbudaya; dan terwujudnya insan yang Islami.<sup>37</sup> Enam karakter yang tercantum dalam visi tersebut merupakan target

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm 150.

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Isrodah pada 7 Maret 2013 di RA DWP UIN Sunan Kalijaga dan dokumentasi buku: Tim Penyusun, *Kurikulum Roudlotul Athfal DWP UIN Sunan Kalijaga Tahun Ajaran 2010-2011*, (Dokumen RA DWP UIN Sunan Kalijaga, 2010) yang diakses pada 25 Februari 2013.

utama yang hendak dicapai oleh sekolah ini dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Islam pada anak usia dini.

Adapun Misi yang ditempuh untuk mencapai target tersebut adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai keislaman dan kepribadian Islam dalam keseluruhan materi pelajaran, serta memberikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari atas dasar nilai-nilai ajaran Islam yang diwujudkan dalam pembiasaan pergaulan disekolah maupun di rumah.<sup>38</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan oleh RA DWP UIN Sunan Kalijaga untuk menanamkan nilai-nilai keislaman kepada para siswanya adalah dengan mengajarkan bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi penting untuk dipelajari sebab Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kitab-kitab keislaman lain yang menjadi sumber nilai-nilai ajaran agama Islam menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa induknya. Oleh sebab itulah, setiap muslim dituntut untuk belajar bahasa Arab sejak dini mungkin. Melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 33 Ayat 3, pemerintah dan negara juga menjamin bahwa bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa peserta didiknya.<sup>39</sup>

Meskipun program pendidikan bahasa Arab belum pernah dibahas dan dirumuskan secara khusus oleh Kemenag namun RA DWP UIN Sunan Kalijaga sudah menerapkan implementasikebijakan pendidikan bahasa Arab, meskipun hanya sebatas pengenalan awal. Tujuannya adalah agar anak-didik memiliki bekal untuk jenjang pendidikan selanjutnya yaitu pada tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Isrodah berikut ini:

“Belum pernah ada pertemuan dengan Kemenag yang membahas tentang pendidikan bahasa Arab bagi anak usia dini RA. Di dalam kurikulum juga tidak disebutkan secara spesifik tentang hal tersebut namun sekolah kami sudah berupaya untuk mengajarkan materi pelajaran bahasa Arab kepada para siswa. Tujuannya agar para

---

<sup>38</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Isrodah pada 7 Maret 2013 di RA UIN Sunan Kalijaga.

<sup>39</sup><http://www.bapsi.undip.ac.id/images/Download/Dokumen/uu%20no.20%20thn%202003%20sisdiknas.pdf>, akses 15 Januari 2013.

siswa kami memiliki bekal untuk jenjang pendidikan selanjutnya yaitu di tingkat SD/MI.”<sup>40</sup>

Pembelajaran bahasa Arab di RA DWP UIN Sunan Kalijaga diajarkan sekali dalam seminggu namun diadakan pengulangan setiap harinya. Maksudnya, jadwal tetap pelajaran bahasa Arab adalah setiap hari Jum’at namun di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu semua guru berkewajiban untuk membiasakan materi pengenalan bahasa Arab kepada para siswa di setiap kelasnya. Pengenalan bahasa Arab setiap hari ini dilakukan pada awal pertemuan yaitu dengan membiasakan mengucapkan kalimat sapaan seperti; *Kaif al-Hal*, *Sabah al-Khair*, *Sabah al-Nur*, *Masa’ al-Khair*, *Masa’ al-Nur*, dan sebagainya.<sup>41</sup>

Setiap hari Jum’at, pendidikan bahasa Arab dilakukan dengan cara menulis dan melafalkan kosakata berbahasa Arab. Misalnya, kata *Misbâhun* (Lampu), *Mâun* (Air), *Hawâun* (Angin), dan *Mas’alun* (Obor). Dalam satu kali pertemuan terdapat 15 kosakata berbahasa Arab yang diperkenalkan kepada para siswa dengan tambahan 1 kosakata baru pada setiap minggunya. Pada hari Jum’at dilakukan pengulangan kembali materi yang telah diberikan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk melatih daya ingat para siswa sekaligus sebagai bahan evaluasi atas pelajaran yang telah diberikan sebelumnya.

Berdasarkan Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) dari Kemenag, materi pelajaran bahasa Arab ada di dalam kurikulum pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). RKM inilah yang dijadikan pedoman RA DWP UIN Sunan Kalijaga untuk merealisasikan pembelajaran bahasa Arab. Meskipun dalam kurikulum materi pelajaran bahasa Arab ada di dalam PAI namun di dalam implementasinya, pendidikan bahasa Arab diajarkan secara terpisah. Adapun tema-tema yang diajarkan disesuaikan dengan silabus seperti tema lingkungan, tanaman, hewan, pekerjaan, alam semesta, tanah airku, rekreasi, dan alat komunikasi. Metode

---

<sup>40</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Isrodah, pada 7 Maret 2013 di RA DWP UIN Sunan Kalijaga.

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Parmi dan Ibu Eni pada 1 Maret 2013 di RA DWP UIN Sunan Kalijaga.

pembelajaran bahasa Arab yang diaplikasikan meliputi; menggambar, menyanyi, gerakan, huruf, dan angka. Penilaian terhadap hasil belajar para siswa adalah dengan carapengamatan secara keseluruhan yang dilakukan setiap hari dan juga setiap akhir pekan. Penilaian hasil belajar secara tertulis dilakukan dengan memberikan tanda bintang dan persentase saja.<sup>42</sup>

Pembelajaran bahasa Arab di RA IT Riyadus Salihin dilaksanakan setiap hari. Materi pelajaran disampaikan oleh guru dilaksanakan pada saat kegiatan fismot (fisik motorik) dengan lagu dan sering kali dilaksanakan sebagai irama braingame. Materi sering kali disampaikan di luar kelas. Hal ini terjadi karena materi bahasa Arab di RA IT Riyadus Salihin berbentuk lirik lagu yang bisa didengarkan dengan senang hati. Sehingga anak tidak terbebani. Selain saat kegiatan fisik motorik, materi bahasa Arab juga disampaikan ulang saat kegiatan sesi pertama yaitu kegiatan keagamaan.<sup>43</sup>

Bila dihubungkan dengan tujuan taksonomi Bloom, Karthwohl, dan Dava yaitu berupa domain kognitif, afektif, dan psikomotorik, maka tujuan pembelajaran bahasa Arab di RA UIN Sunan Kalijaga berada pada domain kognitif yaitu memberikan pengetahuan kepada pembelajar. Adapun tujuan pengetahuan lebih menekankan pada aspek mengetahui dan mengingat sebagai proses psikologis.<sup>44</sup> Pada tingkatan ini anak telah mampu mengenal dan mengingat materi pelajaran kosa kata bahasa Arab yang telah disampaikan oleh guru. Ketika guru selesai menyampaikan materi dan selanjutnya menanyakan kembali materi tersebut maka mayoritas anak akan mampu mengungkapkan kembali materi yang telah disampaikan guru tersebut. Proses inilah yang disebut dengan tahap kompetensi (*competence*), sebagaimana dinyatakan oleh Noam Comsky bahwa pada tahapan proses kompetensi anak mengalami proses

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan guru kelas: Ibu Parmi dan Ibu Eni pada 1 Maret 2013 di RA DWP UIN Sunan Kalijaga.

<sup>43</sup> Yuni Nurhayati, S.S. (guru RA IT Riyadus Salihin

<sup>44</sup> Roestiyah, *Masalah Ilmu Keguruan*, (Jakarta: Bina Asara), hlm. 112



penguasaan terhadap tata bahasa yang meliputi kompetensi semantik, kompetensi sintaksis, dan juga kompetensi fonologi.<sup>45</sup>

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam menentukan materi pelajaran bahasa Arab pada anak usia dini yaitu penguasaan bahasa aktif dan penguasaan bahasa pasif. Penguasaan bahasa aktif seperti bercakap-cakap, dramatisasi, dan mengucapkan syair lagu, yang bertujuan memberi kesempatan anak untuk berkreasi secara lisan, membenarkan lafal, dan ucapan serta mengembangkan kecerdasan anak. Sedangkan penguasaan bahasa pasif seperti bercerita (mendengarkan cerita), sandiwara boneka, dan mendengarkan syair dan lagu. Tujuannya adalah untuk melatih daya tangkap, daya konsentrasi, dan menciptakan suasana senang di kelas.

Tujuan yang terlihat dalam pembelajaran bahasa Arab di RA DWP UIN Sunan Kalijaga lebih condong kepada penguasaan bahasa pasif sebab materi yang diberikan sebatas pengenalan yang bertujuan untuk melatih daya tangkap, daya konsentrasi, dan menciptakan suasana senang di kelas. Dari uraian tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa pendidikan bahasa Arab di RA DWP UIN Sunan Kalijaga diajarkan sebagai bahasa pasif dan hanya sebatas untuk melatih agar siswa mengetahui kosa kata bahasa Arab tanpa harus menuntut atau memaksakan setiap anak didiknya dapat menjadi seorang ahli bahasa Arab. Untuk media pembelajaran yang dimanfaatkan oleh RA DWP UIN Sunan Kalijaga adalah *Media Visual* yaitu media yang dapat dilihat oleh indera mata seperti; papan tulis dan gambar-gambar. Sedangkan tujuan pembelajaran bahasa Arab di RA IT Riyadus Salihin berbeda dengan tujuan pembelajaran bahasa Arab di RA DWP UIN Sunan Kalijaga. Tujuan pembelajaran bahasa Arab di RA IT Riyadussalihin condong kepada penguasaan bahasa arab aktif yang dititikberatkan pada pengenalan terhadap kalimat sempurna dalam bahasa Arab yang disajikan dalam bentuk permainan berupa lagu, tepuk dan tebak gambar dan kata.

---

<sup>45</sup> Hasanah, *Proses Manusia Berbahasa Perspektif Al-Qur'an dan Psikolinguistik*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 56.

Meskipun tidak ada rumusan kebijakan tentang pendidikan bahasa Arab dari pihak pemerintah namun RA DWP UIN Sunan Kalijaga dan RA IT Riyadus Salihin telah menyelenggarakan pendidikan bahasa Arab di lingkungan pendidikannya. Pengajaran bahasa Arab di kedua RA di atas menunjukkan adanya kreativitas pihak sekolah untuk memajukan kurikulum pendidikannya. Kreativitas sekolah ini dijamin oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 yang menyebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah (MBS).<sup>46</sup>

Melalui MBS, pemecahan masalah internal sekolah, baik yang menyangkut proses pembelajaran maupun sumber daya pendukungnya cukup dibicarakan di dalam sekolah dengan masyarakatnya sehingga tidak perlu diangkat ke tingkat pemerintah daerah apalagi sampai ke pemerintahan pusat. Tugas pemerintahan pusat dan daerah adalah memberikan fasilitas dan bantuan pada saat sekolah dan masyarakat menemui jalan buntu dalam suatu pemecahan masalah. Fasilitas yang diberikan pemerintah ini dapat berbentuk *capacity building*, bantuan teknis pembelajaran atau manajemen sekolah, subsidi bantuan sumber daya pendidikan, serta kurikulum nasional dan pengendalian mutu pendidikan baik tingkat daerah maupun tingkat pusat.<sup>47</sup> Prinsip MBS telah dilakukan oleh pihak RA DWP UIN Sunan Kalijaga dan di RA IT Riyadus Salihin yaitu (salah satunya) dengan pengadaan pendidikan bahasa Arab.

Kanwil Kemenag Yogyakarta sebagai lembaga pemerintah daerah yang menaungi RA DWP UIN Sunan Kalijaga dan RA IT Riyadus Salihin juga menyadari prinsip MBS ini. Pihak Kemenag menyatakan bahwa komite sekolah RA berhak mengembangkan sendiri kurikulumnya termasuk tentang pendidikan bahasa Arab. Pihak RA hanya dituntut

---

<sup>46</sup><http://www.bapsi.undip.ac.id/images/Download/Dokumen/uu%20no.20%20thn%202003%20sisdiknas.pdf>, akses 15 Januari 2013.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 73.

untuk memberikan laporan kegiatan tentang setiap aktivitas pendidikan yang dijalankannya sebab RA berada di bawah naungan Kemenag.

Oleh sebab itu, Kemenag berkewajiban untuk memberikan bantuan fasilitas sarana prasarana dan kelengkapan pendidikan lainnya guna memperlancar program pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah. UIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga yang turut menaungi keberadaan sekolah ini juga sering memberikan bantuan berupa sarana prasarana. Misalnya, ijin pemakaian gedung sekolah, bantuan kursi/meja belajar, dan perlengkapan belajar mengajar yang lainnya. Dari berbagai uraian yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik satu kesimpulan umum bahwa tidak adanya kebijakan tentang pendidikan bahasa Arab pada pendidikan anak usia dini disebabkan karena adanya kebijakan otonomi daerah dari pemerintah pusat. Hal inilah yang menjadikan sistem pendidikan bersifat otonomisasi-terpusat. Artinya, terdapat "kebebasan" dari pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan untuk mengembangkan pendidikannya namun dengan tetap berpedoman pada standar sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang bersifat terstruktur dan tersentralisasi dari pusat ke daerah dan ke sekolah-sekolah sudah mulai tidak berlaku lagi. Pihak sekolah lebih dituntut untuk kreatif dalam membuat kebijakan-kebijakan yang akan membantu pengembangan dan kemajuan sekolahnya.

#### **D. Simpulan**

Studi ini menghasilkan kesimpulan penting yaitu:

1. Belum ada rumusan kebijakan dari instansi pemerintah (Kemendiknas ataupun Kemenag) yang mengatur tentang pendidikan bahasa Arab bagi pendidikan anak usia dini khususnya Raudlatul Athfal.
2. RA DWP UIN Sunan Kalijaga dan RA IT Riyadus Salihin telah melaksanakan program pembelajaran bahasa Arab bagi peserta didiknya meskipun pemerintah belum ada rumusan kebijakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Ardi Widodo, Sembodo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Jurusan PBA Fakultas Tarbiyah*, Yogyakarta: Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983.
- Bimantoro, Nur Muhammad, "Kebijakan Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di SMP *Remaja Parakan*", Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2005), t.d.
- Consuelo G. Sevilla et.al, *Pengantar Metode Penelitian*, terj: Alimuddin Tuwu, (Jakarta: UI Press, 1993.
- Danim, Sudaman, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Jakarta: Bina Aksara, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Pembelajaran di TK*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Dzakiyyah, Tsania Husna, "Pembelajaran Bahasa Arab di Play Group Aisyiyah Nur'aini Yogyakarta", Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2008), t.d.
- Fajri, Muhammad Siroj, "Pengajaran Bahasa Arab Pada Anak Pra Sekolah", Skripsi Sarjana Pendidikan Islam (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2004), t.d.
- Fahrudin, Anas, "Metode Pembelajaran Bahasa Arab Anak Usia Dini di TPA Al-Luqmaniyah Umbulharjo Yogyakarta", Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2010), t.d.
- Fakhrurrozi, Aziz dan Erta Mahyudin, *Pembelajaran Bahasa Arab*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemanag RI, 2012.
- Fariyah, Lilis Tri, "Pengajaran Bahasa Arab Untuk Anak Usia Dini", Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2001), t.d.

- Hani, Umi, "Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Agama di Indonesia Tahun 1945-1994", Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 1997), t.d.
- Hasanah, Mamluah, *Proses Manusia Berbahasa: Perspektif Al-Qur'an dan Psikolinguistik*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Pendidikan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Himpaudi, *Suplemen Materi Seminar Nasional Kurikulum PAUD*, Sportorium UMY-Jogjakarta, 28 Mei 2015
- Ibrahim, R. dan Nana Syaodih, *Perencanaan Pengajaran*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Imron, Ali, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Indah, Rohmani Nur dan Abdurrahman, *Psikolinguistik: Konsep & Isu Umum*, Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Musni Jailani, *Psikolinguistik Pembelajaran Bahasa Arab*, Bandung: Humaniora, 2009.
- Mutiah, Diana, *Psikologi Bermain Anak Usia Dini*, Jakarta: kencana, 2010.
- Nata, Abuddin, *Filsafat Pendidikan Islam 1*, Jakarta: Logos, 1997.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Bary, *Kamus Istilah Popular*, Surabaya: Arkol, 1994.
- Rusdinal dan Elizar, *Pengelolaan Kelas Di Taman Kanak-Kanak*, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2005.
- Sarjono dkk, *Panduan Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Seefeldt, Carol & Barbara A. Wasik, *Pendidikan Anak Usia Dini Menyiapkan Anak Usia Tiga, Empat dan Lima Tahun Masuk Sekolah*, Jakarta: Indeks, 2018
- Sudjiono, Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Tehnik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1972.

- Suyadi, *Psikologi Belajar PAUD Pendidikan Anak Usia Dini*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2010.
- Tilaar, H. A. R. dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Usman, Moh. User, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1996.
- Utari, Sri, *Metodologi Pengajaran Bahasa*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Zainiah, Chotimatul, "Kebijakan Pendidikan Orde Baru dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Umum: Studi Atas Kurikulum Pendidikan Agama Islam Tahun 1994", Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2004), t.d.
- Zulkifli, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.

**Internet:**

- <http://www.bapsi.undip.ac.id/images/Download/Dokumen/uu%20no.20%20thn%202003%20sisdiknas.pdf>, diakses pada 15 Januari 2013. (Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)
- <http://www.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2012/10/Permen172010PencegahandanPenanggulanganPlagiatdiPT.pdf>, di akses pada 15 Januari 2013. (Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan)
- <http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/PMA32006.pdf>, diakses pada 15 Januari 2013. (Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama)
- [http://www.pudni.kemendikbud.go.id/wpcontent/uploads/2012/08/permen\\_58\\_2009-ttg-standar-PAUD.pdf](http://www.pudni.kemendikbud.go.id/wpcontent/uploads/2012/08/permen_58_2009-ttg-standar-PAUD.pdf), diakses pada 6 Juni 2013. (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini)